



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR: 8 /KPTS/ I / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



*X*





12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka dibentuk Sekretariat Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Anggaran dan Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Panitia Anggaran dan Sekretariat Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua, diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan** ; disampaikan kepada Yth:





1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 8/KPTS/ I /2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA ANGGARAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR/KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	7.000.000
2.	Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua I	5.000.000
3.	Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	Wakil Ketua II	5.000.000
4.	Kepala BP3D Kab. Halbar	Sekretaris	4.000.000
5.	Kepala BPKD Kab. Halbar	Anggota	3.500.000
6.	Kepala Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Halbar	Anggota	3.500.000
7.	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	3.500.000
8.	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Anggota	3.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT




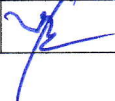
  
**DANNY MISSY**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 8/KPTS/I/2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA ANGGARAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARAN HONOR/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Anggota	1.500.000
2	Adi Prabowo, SH	Anggota	1.500.000
3	Muhammad Ari Faldy, SE	Anggota	1.500.000
4	Faisal Hasan, SE	Anggota	1.500.000
5	Didin Usman, SP, MMA	Anggota	1.500.000
6	Abu Rizal, SP, MMA	Anggota	1.500.000
7	Sonya Mail, SP	Anggota	1.500.000
8	Ustam MH. Zayetsaya, ST	Anggota	1.500.000
9	Fery Arumajaya, SH	Anggota	1.500.000
10	Fataha Idrus, SE	Anggota	1.500.000
11	Irfan M. Bailussy	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



**DANNY MISSY**

